

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arkeologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari aktivitas manusia masa lampau melalui budaya materi, baik berupa artefak, ekofak, fitur, dan situs. Salah satu jenis artefak yang bisa memberikan informasi mengenai kehidupan manusia masa lampau adalah prasasti. Prasasti umumnya berisi putusan resmi yang dikeluarkan oleh raja atau pejabat tinggi kerajaan, sehingga memiliki tingkat keabsahan informasi paling tinggi. Pada konteks penulisan sejarah Indonesia kuno prasasti digunakan sebagai bahan untuk merekonstruksi kebudayaan di masa lampau (Fadhilah & Wiguna, 2019: 210). Untuk mempelajari isi prasasti dapat menggunakan ilmu bantu epigrafi. Menurut Soejono (2001) epigrafi merupakan ilmu yang mengkaji tentang prasasti khususnya kata dan interpretasinya (Saputra, 2021: 3).

Salah satu kerajaan yang banyak mengeluarkan prasasti adalah Kerajaan Malayu. Nama Kerajaan Malayu pertama kali muncul dalam catatan Dinasti Tang yang melaporkan bahwa pada tahun 644 dan 645 Masehi ada utusan dari *Mo-lo-yeu* mengirimkan upeti kepada kaisar Cina. *Mo-lo-yeu* tersebut diinterpretasikan sebagai Kerajaan Malayu yang berada di Pantai Timur Sumatera dengan pusat kerajaannya di wilayah Jambi (Utomo, 1990: 14). Tetapi pada tahun 689 Masehi di dalam catatan pendeta Buddha (I-Tsing) disampaikan

bahwa Kerajaan Malayu tidak muncul lagi dan digantikan oleh *She-li-fo-she* atau yang sering disebut dengan Sriwijaya (Soekmono, 1992: 2-3; Kusumadewi, 2012: 3). Nama Malayu juga muncul dalam *Kitab Pararaton* yang menjelaskan bahwa pada tahun 1275 Masehi Raja Krtanāgara dari Kerajaan Singasari mengirimkan pasukan ke Kerajaan Malayu dan dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu dengan tujuan untuk menjalin kerjasama dalam menghadapi kekuatan pasukan Kubilai Khan (Casparis, 1992: 251). Pada ekspedisi tersebut Raja Krtanāgara mengirimkan sebuah arca Amoghapāśa kepada Śrī Mahārāja Śrīmat Tribhūwanarāja Mauliwarmadewa untuk diletakkan di Śwarnabhūmi tepatnya di Dharmasraya. Nama Ādityawarman sebagai raja Kerajaan Malayu baru muncul di dalam prasasti setelah enam puluh tahun dari peristiwa Ekspedisi Pamalayu (Kusumadewi, 2012: 3).

Ādityawarman sebagai raja Kerajaan Malayu memerintah selama 27 tahun mulai tahun 1347 sampai 1374 Masehi dan telah mengeluarkan 13 prasasti berbahan batu pasir dan andesit (Kusumadewi, 2012: 2). Secara keseluruhan prasasti tersebut berisi pemujaan terhadap sosok Ādityawarman (Kemendikbud, 2019: 7). Sementara jika dirincikan ada beberapa masalah yang dibahas, seperti Prasasti Bandar Bapahat berisi pembuatan irigasi untuk taman dan pertanian, Prasasti Pagaruyung I dan Prasasti Rambatan berisi pendirian sebuah tempat pemujaan bagi agama Buddha. Prasasti Pagaruyung V berisi pembangunan sebuah taman kerajaan, Prasasti Ombilin berisi asal usul Ādityawarman. Prasasti Pagaruyung IV, Prasasti Rambatan, dan Prasasti Lubuk Layang berisi nama dan jabatan di masa Kerajaan Malayu, serta Prasasti Pagaruyung I dan

Prasasti Pagaruyung V yang berisi barang komoditas perdagangan (Kusumadewi, 2012: 2-3).

Pemujaan terhadap raja merupakan salah satu upaya legitimasi kekuasaan agar tetap langgeng. Legitimasi dan kekuasaan akan selalu saling terkait dalam sebuah sistem politik. Legitimasi bisa diartikan sebagai persetujuan dan keabsahan terhadap wewenang atau otoritas yang dimiliki oleh seseorang maupun kelompok sebagai hal yang wajar dan harus dihormati sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat (Budiardjo, 2008: 64-65; Dogan, 1992: 116-117; Ramadhana, 2016: 1). Legitimasi sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan, karena dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang berkuasa akan mengurangi tindakan pemaksaan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat. Max Weber (2015: 135-136) membagi legitimasi menjadi tiga tipe yaitu legitimasi tradisional, legitimasi karismatik, dan legitimasi legal-rasional. Legitimasi tradisional merupakan legitimasi yang berasal dari kebiasaan masyarakat (tradisi) berlanjut secara turun temurun seperti sistem monarki. Legitimasi karismatik merupakan legitimasi yang berasal dari ide dan juga karisma pemimpinnya dan akan hilang seiring dengan lengsernya pemimpin tersebut. Sementara legitimasi legal-rasional berasal dari sebuah sistem prosedur kelembagaan yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat umum (Ramadhana, 2016: 1-2).

Pada pembahasan di atas sudah disinggung mengenai legitimasi, selanjutnya akan dibahas mengenai kekuasaan karena legitimasi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan

(1950: 74) berpendapat bahwa kekuasaan adalah hubungan yang menyebabkan suatu pihak (pihak pertama) mengarahkan (pihak kedua) untuk melakukan tindakan tertentu agar tercapainya tujuan dari pihak pertama. Kekuasaan berwujud abstrak, sehingga antara satu wilayah dengan wilayah lainnya bisa saja berbeda. Menurut Ninie Susanti melalui bukunya yang berjudul *Airlangga: Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI* membagi beberapa konsep kekuasaan dalam tradisi Jawa, yaitu:

1. Kekuasaan bersifat konkret, eksistensi kekuasaan mutlak di alam semesta dengan jumlah dan kadarnya yang tidak bisa diukur.
2. Kekuasaan itu homogen, kekuasaan berasal dari tempat dan jenis yang sama meskipun memiliki wujud yang berbeda.
3. Jumlah kekuasaan selalu tetap ada, kekuasaan akan selalu memiliki jumlah yang sama walaupun berpindah dari satu individu ke individu lain maupun dari satu kelompok ke kelompok lain.
4. Kekuasaan tidak mempertanyakan keabsahan, hal ini karena kekuasaan berasal dari tempat yang sama dan masuk ke semua aspek kehidupan manusia.

Pada saat berlangsungnya periode Hindu-Buddha di Nusantara, semua raja harus menerapkan keempat konsep di atas serta ditambah dengan harus berlaku adil, mengetahui semua kebaikan dan keburukan rakyatnya, berperilaku lemah lembut, serta memiliki keyakinan yang kuat untuk menghancurkan para musuh. Kemudian sifat-sifat tersebut lebih dikenal dengan istilah *astabrata* yang terdapat di dalam *Kakawin Rāmāyana* sargah ke-24 (Boechari, 2012: 164, 227-228, 259; Ramadhana,

2016: 4). Konsep *astabrata* merupakan suatu konsep menyetarakan diri seorang raja dengan kekuatan adikodrati dewa seperti, Siwa, Wisnu, dan Brahma yang memiliki sifat *astadikpalaka* (delapan dewa penjaga mata angin). Dewa tersebut terdiri dari Indra (dewa hujan), Yama (dewa kematian), Surya (dewa matahari), Soma (dewa bulan), Wayu (dewa angin), Kuwera (dewa kekayaan), Waruna (dewa air), dan Agni (dewa api) (Susanti, 2010: 15; Ramadhana, 2016: 4). Jika dijabarkan seorang raja harus selalu memberikan atau menghujani anugerah kepada rakyatnya sebagai representasi dari Dewa Indra, menghukum para penjahat representasi Dewa Yama, menarik sedikit demi sedikit pajak representasi Dewa Surya. Menjadi pelita dalam kegelapan bagi rakyatnya representasi Dewa Soma, mampu menyelesaikan permasalahan terkecil di tempat yang terpencil representasi Dewa Wayu, memiliki kekayaan yang berlimpah representasi Dewa Kuwera. Menjerat para penjahat untuk dihukum representasi Dewa Waruna, dan mampu menghancurkan para musuh dengan cepat dan tepat representasi Dewa Agni (Susanti, 2010: 5-16; Boechari, 2012: 164, 227-228, 259; Ramadhana, 2016: 4-5).

Menurut Ken Bimo Ramadhana (2016), ada beberapa bentuk legitimasi kekuasaan pada masa Hindu-Buddha di Nusantara, diantaranya:

1. Menyetarakan diri dengan dewa;
2. Tahta yang diwariskan secara turun-temurun;
3. *Nāmābhiseka*;
4. Karya sastra.

Aspek legitimasi penyeteraan diri dengan entitas adikodrati (dewa), tahta yang diturunkan secara turun-temurun, dan *nāmābhiseka* bisa ditemukan pada prasasti yang dikeluarkan oleh raja bersangkutan. Prasasti sebagai sumber primer dalam penyusunan sejarah biasanya memuat raja yang memerintah disuatu kerajaan, struktur masyarakat, agama, proses peradilan, dan aspek lainnya seperti ekonomi dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat tersebut. Sehingga tidak jarang juga prasasti digunakan sebagai media legitimasi kekuasaan bagi raja-raja yang ingin melanggengkan kekuasaannya.

Penulis mengambil topik kajian tersebut dengan alasan untuk melanjutkan penelitian terdahulu yang berjudul *Bentuk dan Makna Pahatan Gambar pada Beberapa Prasasti Masa Adityawarman*. Penelitian tersebut mengungkapkan makna dari pahatan gambar pada prasasti-prasasti Ādityawarman diantaranya pahatan kala dan vajra. Kala dimaknai sebagai pelindung dan penjaga di bangunan suci serta sebagai penolak bala (kejahatan). Sementara vajra sebagai senjata yang sulit dihancurkan serta bisa menciptakan petir, sehingga kala dan vajra bermakna sebagai legitimasi Ādityawarman sebagai raja yang bergelar Maharajadiraja (raja yang unggul dari semua raja). Pada penelitian ini hanya dijelaskan makna dari ragam hias prasasti sebagai lambang legitimasi, tetapi belum menyinggung narasi terkait legitimasi berdasarkan teks prasastinya. Adapun urgensi dari penelitian penulis adalah untuk melengkapi penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas bentuk dan makna pahatan gambar prasasti Ādityawarman dengan menggunakan pendekatan semiotika Peirce. Sementara penelitian penulis membahas unsur legitimasi kekuasaan Raja Ādityawarman menggunakan

pendekatan epigrafi dengan analisis teks prasasti. Sehingga dengan adanya penelitian tersebut bisa menambah literatur mengenai prasasti Ādityawarman dari sudut pandang yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana unsur legitimasi yang terkandung dalam teks prasasti-prasasti Ādityawarman?
2. Bagaimana bentuk legitimasi kekuasaan Ādityawarman di Kerajaan Malayu?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kajian. Ruang lingkup wilayah penelitian terletak di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Sementara ruang lingkup kajian yaitu legitimasi kekuasaan Ādityawarman yang terkandung di dalam teks prasasti. Prasasti yang diindikasikan memiliki unsur-unsur legitimasi kekuasaan, yaitu Prasasti Pagaruyung I, Prasasti Pagaruyung II, Prasasti Saruaso I, Prasasti Kuburajo I, Prasasti Amoghapāśa, dan Prasasti Ombilin. Adapun alasan pemilihan 6 prasasti tersebut, pertama karena isi dari 6 prasasti memuat nama Ādityawarman, kedua karena prasasti-prasasti tersebut dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Ādityawarman yang dibuktikan dengan angka tahun pada teks prasasti. Isi keenam prasasti Ādityawarman sebagai berikut:

1. **Prasasti Pagaruyung I**, isi prasasti berupa puji-pujian terhadap keagungan dan kebijaksanaan Ādityawarman sebagai raja yang banyak menguasai pengetahuan, khususnya di bidang keagamaan (Kusumadewi, 2012: 14).
2. **Prasasti Pagaruyung II**, secara umum isinya belum bisa diterjemahkan karena ada beberapa kalimat hasil alih bahasa yang tidak utuh (Istiawan, 2006: 10). Tetapi pada baris ke-13 menyebutkan nama Ādityawarman sebagai seorang raja yang bisa memberantas musuh-musuhnya (Kusumadewi, 2012: 21).
3. **Prasasti Saruaso I**, isi prasasti menyebutkan pentasbihan Ādityawarman sebagai *ksetrajña* dengan nama *Wiśesadharani* aliran Bhairawa di Surāwāsa (Kusumadewi, 2012: 22).
4. **Prasasti Kuburajo I**, isi prasasti menyebutkan bahwa Ādwayawarman memiliki putra dari Wangsa Kulisadhara dan menyebutkan juga Ādityawarman sebagai raja *Kanakamedinīndra* (penguasa tanah emas) (Kusumadewi, 2012: 27).
5. **Prasasti Amoghapāśa**, isi prasasti menyebutkan terkait pentasbihan sekelompok arca Buddha dari Amoghapāśa-Gaganagañja dan kawan-kawannya yang ditempatkan di suatu bangunan suci yang disebut *Jiña*. Kemudian juga menyebutkan kebajikan yang dilakukan umat Buddhis, pengetahuan akan latihan yoga Mahāyāna, dan pujian terhadap sepasang suami istri dewa (*Mātangiñīśa Tārā*) yang mempunyai sifat Buddha, meskipun lingkungannya bersifat Śiwa (Kusumadewi, 2012: 12).

6. **Prasasti Ombilin**, isi prasasti berupa penghormatan terhadap Ādityawarman yang pandai dalam membedakan dharma dan adharma, mempunyai sifat sebagai matahari yang bisa membakar orang jahat serta menolong orang yang baik (Kusumadewi, 2012: 23).

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi unsur legitimasi yang terkandung dalam teks prasasti-prasasti Ādityawarman.
2. Mengetahui bentuk legitimasi kekuasaan Ādityawarman di Kerajaan Malayu.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Arkeologi Universitas Jambi.
2. Manfaat bagi peneliti dan instansi terkait, sebagai sumber literatur yang berkaitan dengan aspek legitimasi kekuasaan Ādityawarman di Kerajaan Malayu berdasarkan sumber-sumber prasasti. Selain itu sebagai bahan analisis, diskusi, dan komparasi di dalam bidang kajian yang sama.
3. Manfaat bagi masyarakat, bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait legitimasi kekuasaan Ādityawarman di Kerajaan Malayu berdasarkan sumber-sumber prasasti. Sehingga muncul kesadaran untuk tetap melestarikan keberadaan prasasti baik yang *in situ* maupun *ex situ*.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan terhadap beberapa pustaka atau literatur terkait pokok permasalahan yang akan dibahas. Tinjauan pustaka terdiri dari penelitian terdahulu, penelitian relevan, dan kerangka teori.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Salah satu yang menjadi pedoman penulis di dalam melakukan penelitian ini adalah data dari penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan terhadap objek kajian yang sama yaitu prasasti-prasasti Ādityawarman. Pada sub bab penelitian terdahulu, penulis akan mencantumkan berbagai hasil penelitian dalam bentuk ringkasannya. Hasil penelitiannya bisa dalam bentuk laporan, artikel, jurnal, buku, skripsi, tesis, dan disertasi. Hal ini akan memperlihatkan sejauh mana posisi penelitian yang akan dilakukan (Saputra, 2021: 9).

Penelitian mengenai prasasti Ādityawarman diantaranya dikaji oleh J. G. de Casparis (1985) dalam laporan khusus yang berjudul *Srivijaya dan Malayu* pada SPAFA Consultative Workshop on Archeological and Environmental Studies on Srivijaya di Jakarta, Padang, dan Medan. Laporan ini berisi penjelasan tentang Srivijaya dan Malayu sebagai kerajaan besar di Sumatera, Raja Ādityawarman sebagai salah satu raja Kerajaan Malayu serta beberapa prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahannya. Diantara prasasti tersebut yaitu Prasasti Amoghapāśa yang menyebutkan gelar Ādityawarman (Śri Udayādityavarmmā Pratāpaparākrama Rajendramaulimanivarmmadeva Mahārādhirājā), Prasasti Kuburajo I berisi informasi bahwa Ādityawarman merupakan anak dari Ādwayavarman (Ādwayawarman), dan Prasasti Saruaso II berisi informasi bahwa Ādityawarman

memiliki anak bernama Ānanggawarman (Casparis, 1985). Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian Casparis berisi narasi Kerajaan Malayu dan alih aksara serta alih bahasa beberapa prasasti yang berasal dari Kerajaan Malayu. Sementara penelitian penulis menganalisis teks prasasti Ādityawarman untuk menunjukkan adanya upaya legitimasi melalui teks prasasti.

Budi Istiawan (2006) dalam bukunya yang berjudul *Selintas Prasasti dari Melayu Kuno* diterbitkan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar yang membahas alih aksara dan alih bahasa dari 19 prasasti Ādityawarman, yaitu Prasasti Pagaruyung I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Prasasti Saruaso I dan II, Prasasti Kuburajo I dan II, Prasasti Rambatan, Prasasti Ombilin, Prasasti Bandar Bapahat, Prasasti Pariangan, Prasasti Amoghapāśa, dan Prasasti Dharmaśraya (Istiawan, 2006). Bambang Budi Utomo (2007) dalam bukunya *Prasasti-Prasasti Sumatera* yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Badan Pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Buku ini berisi katalog prasasti yang ditemukan pada wilayah Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, dan Sumatera Utara. Pada wilayah Sumatera Tengah tercatat 21 prasasti yaitu Prasasti Pagaruyung I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Prasasti Saruaso I dan II, Prasasti Kuburajo I, II, III, dan IV, Prasasti Rambatan, Prasasti Ombilin, Prasasti Bandar Bapahat, Prasasti Pariangan, Prasasti Amoghapāśa, serta Prasasti Dharmaśraya (Utomo, 2007). Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian Budi Istiawan dan Bambang Budi Utomo merupakan tahap awal dalam

alih aksara dan alih bahasa prasasti Kerajaan Malayu dan belum memaparkan upaya legitimasi yang dilakukan oleh Ādityawarman melalui teks prasasti.

Sri Ambarwati Kusumadewi (2012) dalam tesisnya pada Program Studi Arkeologi, Universitas Indonesia yang berjudul *Ādityawarman (1347-1374 Masehi) Kajian Epigrafi*. Tesis tersebut membahas alih aksara dan alih bahasa dari 17 prasasti masa Ādityawarman yaitu Prasasti Amoghapāśa, Prasasti Pagaruyung I, Prasasti Rambatan, Prasasti Pagaruyung II, Prasasti Saruaso I, Prasasti Ombilin, Prasasti Bandar Bapahat, Prasasti Kuburajo I, Prasasti Pagaruyung IV, Prasasti Pagaruyung V, Prasasti Pariangan, Prasasti Saruaso II, Prasasti Dharmasraya, Prasasti Pagaruyung III, Prasasti Pagaruyung VI, Prasasti Pagaruyung VII, dan Prasasti Pagaruyung IX. Selain itu juga membahas unsur kebahasaan, ornamen prasasti, serta interpretasi prasasti berdasarkan metode penelitian sejarah (heuristik, analisis (kritik), interpretasi, dan historiografi) (Kusumadewi, 2012). Perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian Kusumadewi memberikan narasi terkait Ādityawarman dan Kerajaan Malayu dengan sumber prasasti, tetapi menggunakan metode penelitian disiplin ilmu sejarah. Sementara penelitian penulis menggunakan metode penelitian disiplin ilmu epigrafi.

Dodi Chandra (2016) dalam artikelnya berjudul *Lambang Raja Adityawarman (1347-1374 M) Sebuah Deskripsi Awal* yang diterbitkan oleh Balai Arkeologi Sumatera Utara. Artikel ini membahas tanda khusus yang ada pada prasasti Ādityawarman yaitu bonggol sulur, kepala kala, dan hewan seperti kadal yang diindikasikan sebagai lambang keagamaan, khususnya Buddha aliran Tantrayana sekte Bhairawa. Selain sebagai tanda khusus bidang keagamaan, ornamen tersebut

juga digunakan sebagai bentuk legitimasi bagi Ādityawarman sebagai penguasa Bhumi Malayu (Chandra, 2016). Perbedaan dengan penelitian penulis, artikel ini membahas makna dan gambar pada prasasti Ādityawarman. Sementara penelitian penulis menganalisis teks prasasti untuk mengetahui adanya upaya legitimasi yang dilakukan Ādityawarman.

Ratri Oktaviani (2021) dalam skripsinya pada Program Studi Arkeologi, Universitas Jambi yang berjudul *Bentuk dan Makna Pahatan Gambar pada Beberapa Prasasti Masa Adityawarman* dengan kesimpulan bahwa terdapat pahatan kala dan vajra yang digunakan sebagai tanda khusus Kerajaan Malayu pada periodisasi Ādityawarman. Kala dimaknai sebagai pelindung dan penjaga di bangunan suci serta sebagai penolak bala (kejahatan). Sementara vajra sebagai senjata yang sulit dihancurkan yang bisa menciptakan petir. Sehingga kala dan vajra dimaknai sebagai legitimasi Ādityawarman yang bergelar Maharajadiraja (yang unggul dari semua raja), memiliki kekuatan yang tidak tertandingi, mampu mengalahkan musuhnya, serta sebagai perwujudan dari Dewa Indra (Oktaviani, 2021). Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini mengungkapkan makna dari pahatan gambar pada prasasti Ādityawarman. Meskipun penelitian ini sudah menyinggung legitimasi, namun hal tersebut didasarkan pada makna pahatan gambar bukan berdasarkan analisis teks prasasti masa Ādityawarman.

Semua penelitian terdahulu dimulai dari Casparis (1985) yang membahas sejarah dan transliterasi beberapa prasasti dari Kerajaan Malayu, kemudian Budi Istiawan (2006) yang membahas alih aksara dan aih bahasa dari 19 prasasti dari Kerajaan Malayu, Sri A. Kusumadewi (2012) yang membahas alih akasara dan alih

bahasa dari 17 prasasti Kerajaan Malayu, Dodi Chanda (2016) dan Ratri Oktaviani (2021) yang membahas makna dari pahatan gambar pada 6 prasasti masa Ādityawarman. Hasil penelitian di atas belum ditemukan yang membahas unsur legitimasi kekuasaan Ādityawarman berdasarkan sumber prasasti menggunakan pendekatan epigrafi. Meskipun ada yang membahas legitimasi Ādityawarman, tetapi hal itu diteliti menggunakan pendekatan semiotika berupa pahatan gambar yang ada di prasasti tersebut. Adapun kebaruan (novelty) penelitian penulis, yaitu menggunakan metode pendekatan epigrafi dan menggunakan 2 teori yakni teori bentuk legitimasi masa Hindu-Buddha di Nusantara menurut Ken Bimo Ramadhana dan teori bentuk legitimasi menurut Max Weber.

1.6.2 Penelitian Relevan

Penelitian dengan objek kajian prasasti sudah banyak dilakukan karena di Indonesia sangat banyak hasil kebudayaan masa lampau dalam bentuk catatan tertulis atau sering disebut prasasti, baik yang berasal dari masa Hindu-Buddha (klasik), Islam, maupun kolonial. Diantara penelitian yang berfokus pada legitimasi seorang raja berdasarkan sumber prasasti dilakukan oleh Ken Bimo Ramadhana (2016) dalam skripsinya pada Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia yang berjudul *Legitimasi Kekuasaan Raja Majapahit Berdasarkan Nāmābhiseka*. Kesimpulan dari skripsi tersebut bahwa di dalam prasasti masa Majapahit sarana legitimasi kekuasaan rajanya bisa dilihat dalam *nāmābhiseka* (nama penobatan raja). *Nāmābhiseka* memuat beberapa aspek diantaranya penyetaraan diri terhadap entitas adikodrati, penyebutan garis keturunan atau nama dinasti, dan puji-pujian terhadap raja (*rājapūjā*).

Penyetaraan diri dengan entitas adikodrati biasa dikenal dengan konsep *dewarāja*. Dewa yang disetarakan diantaranya Siwa dengan *nāmābhiseka Parameśwara*, *Īśwara*, dan *Bhūteśwara*, Wisnu dengan *nāmābhiseka Mahalaksmyawatārā* (Laksmi sakti Wisnu), *Girīndrawāddhana* (mengokohkan Meru). *Nāmābhiseka* dengan unsur penyebutan garis keturunan atau nama dinasti bisa dilihat dalam keluarga Kerajaan Majapahit sebagai lanjutan Dinasti Rajasa yang didirikan Ken Arok saat memerintah Kerajaan Singasari. Sementara unsur aspek legitimasi berupa pujian (*rājapūjā*) digunakan karena raja dianggap sebagai sebagai dewa di dunia (Ramadhana, 2016: 90-94).

Relevansi penelitian Ken Bimo Ramadhana dengan penelitian penulis adalah topik kajian yang sama yaitu membahas upaya legitimasi seorang raja menggunakan sumber prasasti. Sementara perbedaan penelitian Ken Bimo Ramadhana dengan penelitian penulis yaitu penelitian Ken Bimo Ramadhana hanya membahas satu bentuk legitimasi kekuasaan berdasarkan teks prasasti yaitu *nāmābhiseka*. Sementara penelitian penulis membahas ada 2 bentuk legitimasi kekuasaan berdasarkan teks prasasti yaitu menyetarakan diri dengan entitas adikodrati (dewa) dan *nāmābhiseka*.

1.6.3 Kerangka Teori

Kata prasasti merupakan serapan dari bahasa Sanskerta yaitu *śams* yang berarti pujian (Saputra, 2021: 2). Menurut Bakker prasasti adalah maklumat yang dipahatkan pada batu, logam, daun tal (lontar), kayu, dan bahan lainnya yang dirumuskan dengan kaidah tertentu dan berisi anugerah atau hak istimewa yang dikeluarkan oleh raja atau pejabat kerajaan. Keputusan yang diputuskan dalam

prasasti bersifat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena penetapannya diresmikan dengan upacara tertentu (Bakker, 1972: 10; Sari, 2016: 59). Ada beberapa kriteria pengelompokan prasasti, pertama berdasarkan jenis bahan prasasti yang terdiri atas *lingga prasasti* yaitu prasasti yang ditulis pada batu berbentuk lingga, *tambra prasasti* yaitu prasasti yang ditulis pada tembaga, dan *ripta prasasti* yaitu prasasti yang ditulis pada daun lontar. Kedua pengelompokan berdasarkan isi prasasti yang terdiri atas prasasti *jaya patra* yaitu prasasti yang berisi keputusan pengadilan tentang kewarganegaraan, prasasti *jaya song* yaitu prasasti yang berisi permasalahan sengketa tanah, dan prasasti *suddha patra* yaitu prasasti yang berisi pelunasan utang piutang (Sari, 2016: 59).

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori legitimasi yang dikemukakan oleh Max Weber tahun 1968 dalam bukunya *Economy and Society an Outline of Interpretive Sociology* diterbitkan oleh University of California Press. Weber membagi legitimasi menjadi 3 yaitu:

1. Legitimasi tradisional (traditional authority), merupakan legitimasi yang otoritasnya (kekuasaannya) bersifat kekal dan dipraktikkan oleh para patriarki dan pangeran patrimonial aliran lama (Ningrum, 2018: 4). Lembaga pemerintahannya berlanjut secara turun-temurun (Ramadhana, 2016: 1).
2. Legitimasi karismatik (charismatic authority), merupakan otoritas yang didasarkan pada karisma seorang pemimpin (Ningrum, 2018: 4). Lembaga pemerintahan dan sistem administrasinya bersifat lemah dan akan hilang setelah pemimpinnya lengser (Ramadhana, 2016: 2).

3. Legitimasi legal-rasional (legal authority), merupakan otoritas yang didasarkan pada legalitas dalam validitas undang-undang hukum yang dibenarkan oleh aturan-aturan yang rasional (Ningrum, 2018: 5). Lembaga pemerintahannya menetapkan dan menegakkan hukum serta ketertiban demi kepentingan umum (Ramadhana, 2016: 2).

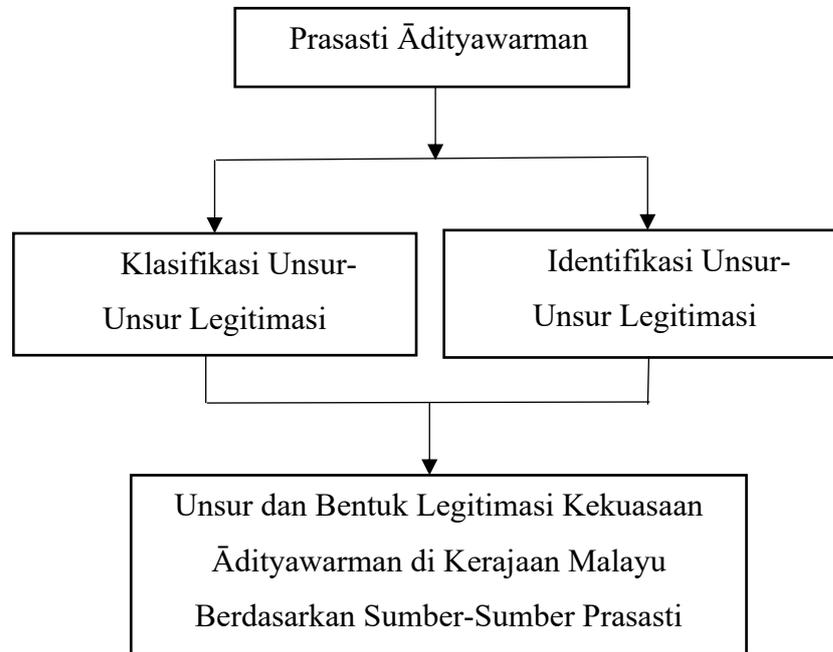
Sementara legitimasi kekuasaan pada masa Hindu-Buddha di Nusantara terbagi menjadi 4:

1. Menyetarakan diri dengan entitas adikodrati (dewa), yaitu menganggap raja sebagai wakil dewa di dunia atau raja sebagai titisan dewa (Ramadhana, 2016: 5). Konsep tersebut dikenal dengan *dewarāja* yang banyak berkembang di Asia Tenggara Daratan maupun Kepulauan yang umumnya bertujuan untuk melindungi kekuasaan raja. Konsep *dewarāja* di Jawa berkaitan dengan *istadewata* yaitu konsep mengenai dewa pelindung yang diistimewakan oleh para pemujanya. Hal ini sering diimplementasikan dalam pengarcaan raja yang telah wafat dalam bentuk dewa tertentu, seperti Raja Airlangga yang dibuat arcanya dengan memasukkan unsur Dewa Wisnu (Alnoza, 2020: 98).
2. Tahta yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga raja yang naik tahta akan langsung memperoleh legitimasi dari silsilah terdahulunya. Hak waris yang utama akan dipegang oleh putra mahkota (hino) (Ramadhana, 2016: 5). Cara legitimasi ini umumnya banyak dipraktikkan oleh sistem kerajaan baik masa Hindu-Buddha maupun masa sekarang bagi negara yang masih menganut sistem monarki absolut.

3. *Nāmābhiseka*, yaitu gelar yang diberikan saat seseorang diangkat menjadi raja. Biasanya *nāmābhiseka* terdiri atas nama dewa pelindung yang dipuja atau dewa yang menitis kepadanya dan nama pendahulunya (Ramadhana, 2016: 5). Salah satu contoh *nāmābhiseka* yang digunakan oleh raja Majapahit Jayanagara (anak Raden Wijaya) yaitu *Sundarapāṇḍya Dewādhīśwara* dengan arti “manusia suci yang indah, Dewa Īśwara yang agung”. Melalui *nāmābhiseka* tersebut bisa diketahui bahwa Jayanagara memiliki dewa pelindung yaitu Dewa Īśwara (Ramadhana, 2016: 78).
4. Karya sastra, contohnya seperti yang dilakukan oleh Raja Airlangga dalam Kakawin Arjunawiwaha yang digubah Mpu Kanwa dari tahun 1021 sampai 1035 Masehi bahwa Airlangga merupakan raja yang kuat mampu mengalahkan musuhnya (Susanti, 2010: 76-77; Ramadhana, 2016: 5).

Penulis menggunakan 2 jenis teori yaitu teori bentuk legitimasi kekuasaan masa Hindu-Buddha di Nusantara menurut Ken Bimo Ramadhana. Adapun alasan pengaplikasian teori ini untuk mengidentifikasi dan mengklasifikan unsur legitimasi dalam teks prasasti-prasasti Ādityawarman. Sementara teori kedua yaitu teori bentuk legitimasi kekuasaan menurut klasifikasi Max Weber diaplikasi untuk mengetahui bentuk legitimasi yang dilakukan oleh Raja Ādityawarman di Kerajaan Malayu.

1.7 Alur Pemikiran



Bagan 1.1 Alur Pemikiran

Sumber: Eka Pratiwi, 2024

1.8 Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian epigrafi yang diterapkan oleh Riboet Darmosoetopo dalam bukunya yang berjudul *Sima dan Bangunan Keagamaan di Jawa Abad IX-X TU*. Metode penelitian epigrafi terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data (analisis), penafsiran (interpretasi masalah), penarikan kesimpulan, dan penyajian hasil penelitian (Darmosoetopo, 2003: 20-21). Tetapi dalam penelitian ini penulis tidak melaksanakan semua tahapan metode penelitian epigrafi, karena pengolahan datanya tidak melakukan alih aksara dan alih bahasa prasasti melainkan

menggunakan hasil pembacaan prasasti dari penelitian terdahulu. Adapun jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan alur pemikiran induktif, serta bersifat interpretatif yang menggunakan pendekatan bentuk legitimasi kekuasaan masa Hindu-Buddha di Nusantara dan klasifikasi legitimasi kekuasaan menurut Max Weber. Metode tersebut akan penulis terapkan untuk mengetahui unsur dan bentuk legitimasi kekuasaan Ādityawarman di Kerajaan Malayu berdasarkan sumber-sumber prasasti.

1.8.1 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data diawali dengan observasi langsung ke lapangan untuk menginventarisasi (mendata) prasasti-prasasti masa pemerintahan Ādityawarman yang diindikasikan memuat unsur legitimasi. Hal ini bertujuan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan waktu penelitian mengingat prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Ādityawarman cukup banyak. Setelah tahap inventarisasi dilanjutkan dengan studi pustaka terkait hasil alih aksara dan alih bahasa prasasti-prasasti Ādityawarman serta bahan bacaan yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan dari sumber prasasti. Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

1.8.1.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau pihak pertama. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan melakukan observasi (mengamati) langsung ke lapangan. Pada saat di lapangan akan dilakukan pendokumentasian, deskripsi, dan pengukuran objek kajian. Sementara untuk data alih aksara dan alih bahasa prasasti Ādityawarman penulis menggunakan hasil

bacaan terdahulu, diantaranya Budi Istiawan dari bukunya *Selintas Prasasti dari Melayu Kuno*, Sri Ambarwati Kusumadewi dari tesisnya *Ādityawarman (1347-1374 Masehi) Kajian Epigrafi*, tulisan H. Kern dan F. D. K. Bosch yang ditransliterasi oleh Uli Kozok dan Erik van Reijn dari artikelnya *Three Fourteen Century Inscriptions by Ādityawarman*.

1.8.1.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung penelitian. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian dengan melakukan studi pustaka terhadap semua karya ilmiah yang relevan dengan penelitian penulis. Kegiatan studi pustaka tersebut mencakup penelitian relevan, teori, dan konsep-konsep dalam penelitian prasasti.

1.8.2 Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap lanjutan dari pengumpulan data yang telah diolah dan kemudian akan dibentuk menjadi dua dimensi. Data primer akan diolah agar dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi teks di dalam prasasti-prasasti Ādityawarman yang mengandung unsur legitimasi. Selain itu pengolahan data juga dapat berupa pendeskripsian dan olah digital foto objek sebagai data pendukung. Sementara pengolahan data sekunder dilakukan dengan memasukkan beberapa data relevan yang telah dikumpulkan sebelumnya.

1.8.2.1 Analisis

Tahapan analisis pada penelitian ini menggunakan analisis teks. Analisis teks (*textual analysis*) merupakan salah satu cabang dari semiotika teks yang mengkaji

teks sebuah produk penggunaan bahasa berupa kumpulan maupun kombinasi tanda-tanda. Sementara teks didefinisikan sebagai produk bahasa dalam bentuk tulisan (Piliang, 2004: 189). Produk teks yang digunakan dalam penelitian ini adalah prasasti-prasasti masa Ādityawarman yang saat ini menjadi koleksi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi teks prasasti yang mengandung unsur-unsur legitimasi kekuasaan.

1.8.3 Penafsiran (Interpretasi Masalah)

Interpretasi merupakan tahapan untuk menjelaskan jawaban atas permasalahan penelitian setelah dilakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap penafsiran data penulis menggunakan 2 pendekatan yaitu bentuk legitimasi kekuasaan di Nusantara pada masa Hindu-Buddha dan bentuk legitimasi menurut klasifikasi Max Weber. Pendekatan tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan teks prasasti Ādityawarman yang mengandung unsur legitimasi. Kemudian hasil identifikasi dan klasifikasi terhadap teks prasasti Ādityawarman akan dianalisis melalui analisis teks yang menghasilkan bentuk legitimasi Raja Ādityawarman di Kerajaan Malayu

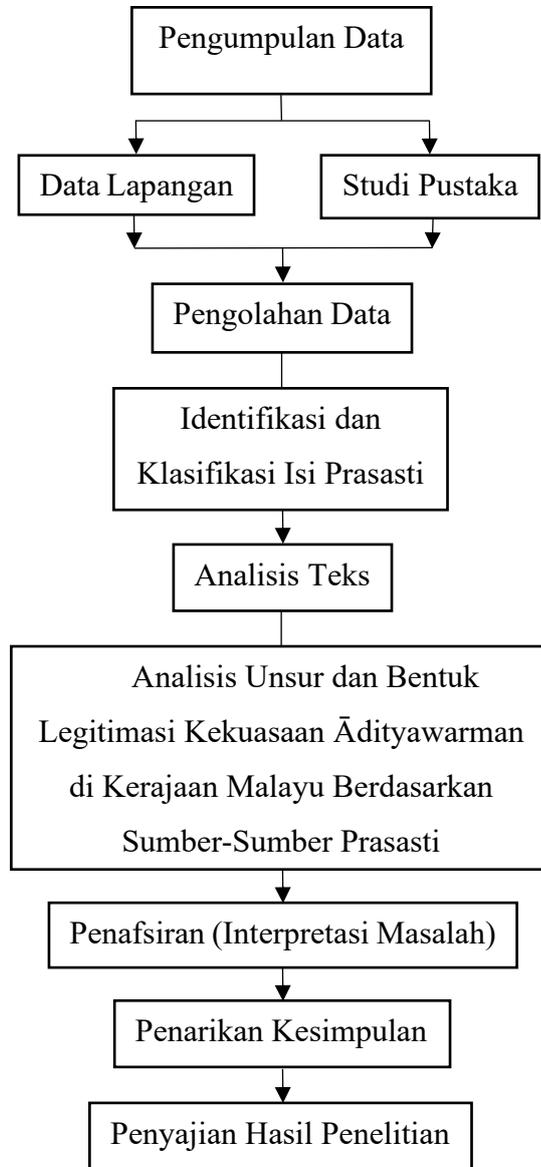
1.8.4 Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahapan yang dilakukan setelah data diolah menggunakan metode yang sudah ditetapkan. Penarikan kesimpulan berisi jawaban dari pertanyaan di permasalahan penelitian, yaitu unsur dan bentuk legitimasi kekuasaan Ādityawarman di Kerajaan Malayu berdasarkan sumber-sumber prasasti.

1.8.5 Penyajian Hasil Penelitian

Penyajian hasil penelitian berbentuk penjabaran secara sistematis yang dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian menjabarkan jawaban dari rumusan masalah yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan Ādityawarman di Kerajaan Melayu berdasarkan sumber-sumber prasasti.

1.9 Alur Penelitian



Bagan 1.2 Alur Penelitian

Sumber: Eka Pratiwi, 2024